

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan serangkaian tujuan pembangunan yang telah disepakati secara global yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia secara global. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) merupakan sebuah kerangka yang mencakup 17 tujuan yang saling terkait dan komprehensif (Lile et al., 2024). Gizi merupakan poin kunci dalam SDGs 2 “Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan nutrisi serta mendorong pertanian berkelanjutan” ialah komponen penting untuk mencapai tujuan-tujuan SDGs lainnya (Grosso et al., 2020). Salah satu tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan SDGs 2 adalah masalah malnutrisi.

Permasalahan malnutrisi kronis pada anak kecil masih menjadi masalah global yang sangat serius (Vaivada et al., 2020). Permasalahan ini terjadi dikarenakan hampir setengah kematian yang terjadi pada usia di bawah 5 tahun disebabkan oleh malnutrisi. Kondisi ini menyebabkan peningkatan perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap permasalahan gizi (Leroy & Frongillo, 2019). Tujuannya adalah mengeliminasi kejadian malnutrisi. WHO (2020) dalam Dukhi (2020) menyatakan bahwa, dengan hilangnya malnutrisi diperkirakan dapat menghilangkan 32% dari beban penyakit global (Dukhi, 2020).

Malnutrisi pada kondisi kronis yang terjadi pada anak usia dini dapat menjadi penyebab stunting. Stunting merupakan kondisi anak yang berusia di bawah 5 tahun yang tidak tumbuh dengan optimal. Kondisi ini ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dari standar pertumbuhan anak yang telah ditetapkan oleh WHO (Uwiringiyimana et al., 2022). Unicef (2013) mendefinisikan bahwa stunting merupakan presentase anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi badan di bawah minus dua (stunting sedang dan berat) dan minus tiga (stunting kronis), hal ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO (UNICEF, 2013).

Prevalensi dan tingkat keparahan stunting pada suatu negara dapat menjadi indikator yang baik untuk digunakan dalam penilaian kondisi suatu populasi. Kejadian stunting memberikan dampak negatif bagi kehidupan anak. Tidak hanya menyerang kondisi fisik sehingga rentan terhadap penyakit menular, stunting juga dapat mempengaruhi potensi belajar anak yang disebabkan perkembangan kognitif yang lambat yang menyebabkan kapa-tistas belajar anak terbatas. Kondisi ini dapat meningkatkan kondisi anak lambat sekolah, kegagalan sekolah, nilai akademik yang rendah, hingga menyebabkan anak putus sekolah (Rueda-Guevara et al., 2021). Hal ini tentu saja menghambat pembangunan sumber daya manusia.

Stunting kini telah ditetapkan menjadi masalah kesehatan masyarakat yang utama. Secara global angka stunting pada tahun 2022 sekitar 22.3% atau sekitar 148.1 juta. Trend kejadian stunting pada tingkat global sejak tahun 2000-2022 mengalami penurunan. Penurunan trend stunting global terjadi karena, keberhasilan implementasi intervensi konvergen secara multisektoral di berbagai negara (Syafrawati et al., 2023).





Sumber : (Who & Bank, 2023)

Terjadinya trend penurunan stunting secara global menjadi bukti tindakan yang konkret dari pemerintah global untuk mencapai tujuan menghilangkan prevalensi stunting sebesar 40% antara tahun 2010 dan 2025. Dalam mencapai penurunan target global, penurunan stunting ditargetkan menurun sebesar 4% setiap tahunnya. Pada tahun 2022, lebih dari setengah balita yang mengalami stunting di dunia berada di Asia (52%) sedangkan lebih dari sepertiganya (43%) berada di Afrika. Angka kejadian stunting di wilayah Asia tenggara menjadi yang tertinggi di dunia. Prevalensi stunting di Asia Tenggara sebesar 53.7 juta dari 76.6 juta kejadian stunting di wilayah Asia (WHO and Bank, 2023). Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara. Berdasarkan data WHO (2022), Indonesia berada pada peringkat kedua setelah Timur Leste (WHO and Bank, 2023). Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022 trend kejadian stunting di Indonesia semenjak tahun 2013-2022 mengalami penurunan.



Sumber : (SSGI, 2022)

Prevalensi stunting yang setiap tahunnya menurun di Indonesia, faktanya tidak dapat menyangkal bahwa prevalensi stunting di Indonesia masih tinggi. WHO (2023) masih mengkategorikan Indonesia sebagai negara dengan prevalensi stunting yang sangat tinggi (WHO and Bank, 2023). Pemerintah Indonesia telah menetapkan komitmen nasional dalam menangani kasus gizi buruk pada anak termasuk permasalahan stunting. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting di Indonesia menjadi 14% pada tahun 2024 (SSGI, 2020).



Penurunan prevalensi stunting baik pada tingkat global dan Indonesia απαι tanpa adanya komitmen yang kuat, konvergensi multipihak diperlukan untuk dapat bekerja secara bersama-sama, bergotong royong mendukung dalam mencapai komitmen bersama (BKKBN, 2020). Intervensi yang holistik dan terkoordinasi dalam menangani stunting telah diakui secara luas. Pendekatan lintas sektor dianggap penting dalam konteks ini karena stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor

yang saling terkait, termasuk aspek gizi, sanitasi, akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan sosial.

Seluruh dunia telah menyetujui bahwa dalam rangka menangani stunting maka, sangat relevan apabila seluruh sektor dapat terlibat (Rueda-Guevara et al., 2021). Berdasarkan hasil konferensi International 1997 mengenai aksi antar sektor untuk kesehatan mendefinisikan bahwa aksi lintas sektoral merupakan hubungan yang diakui antara sebagian atau sebagian sektor kesehatan dengan sektor lainnya (non-kesehatan) yang telah dibentuk untuk ikut serta dan berpartisipasi melakukan tindakan terhadap suatu permasalahan guna mencapai hasil kesehatan yang diinginkan dengan cara yang lebih efektif, efisien atau berkelanjutan daripada yang dapat dicapai oleh sektor kesehatan itu sendiri (Sarker & Joarder, 2012).

Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2024 (RAN PASTI) merupakan upaya nasional yang membutuhkan kolaborasi antar sektor untuk mencapai *goals* yang diinginkan. Hal ini ditandai dengan kerangka pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting menggunakan tiga pendekatan, dimana pendekatan tersebut memiliki fungsi untuk mengontraskan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan percepatan penurunan stunting.



Sumber : (BKKBN, 2021)

Pendekatan multisektor dan multipihak merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam pelaksanaan Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi dan kolaborasi lintas sektor pada penanganan stunting sangat dibutuhkan. Penanganan stunting tidak hanya dilakukan oleh pihak level kementerian saja namun, juga harus dibarengi dengan pelaksanaan kolaborasi pada level pemerintah daerah hingga desa (BKKBN, 2021). Hal ini berdasarkan pada Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting bahwa



penurunan stunting merupakan tugas dan kewajiban bersama semua masyarakatnya menjadi tugas pemerintah baik pusat maupun daerah, serta daerah dan instansi vertikal. Pada prosesnya tidak hanya sektor kesehatan yang terlibat, sektor non-pemerintah seperti dengan dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi, berbagai organisasi profesi, LSM, keamanan hingga media massa juga ikut serta dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Kebijakan pemerintah yang bersifat prioritas diarahkan dan didorong pada kondisi yang terkonvergen (Pakaya et al., 2023). Keterlibatan seluruh entitas menjadi suatu keharusan, baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal, termasuk hingga ke level desa. Hal ini dikarenakan stunting dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat saat ini dan di masa mendatang. Kondisi ini membuat masalah stunting membutuhkan intervensi yang terkoordinasi atau terkonvergen.

Koordinasi yang terkonvergen sangat diperlukan dalam pelaksanaan intervensi stunting, mengingat bahwa permasalahan stunting tidak hanya disebabkan oleh faktor pelayanan kesehatan. Pemerintah memiliki kebijakan intervensi sensitif sebagai upaya dalam menangani permasalahan stunting di Indonesia. Kegiatan intervensi sensitif yang melibatkan organisasi lintas sektoral memberikan kontribusi sebesar 70% terhadap penurunan stunting (Lailia et al., 2021). Kolaborasi lintas sektor dapat menjadi strategi untuk mengatasi permasalahan yang kompleks baik bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sektor lainnya termasuk permasalahan stunting (Utomo et al., 2023).

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan oleh Nurhaeni dkk. (2021) bahwa bentuk kolaborasi penanganan stunting sangat berdampak terutama pada masa pandemi Covid-19 (Nurhaeni et al., 2021). Pendekatan multisektoral yang terkonvergensi telah terbukti dapat menurunkan prevalensi stunting di Peru, Senegal, dan Nepal melalui kepemimpinan, komitmen politik, dan partisipasi semua sektor, masyarakat, dan pribadi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ipan, Purnamasari dan Priyanti (2021) mengenai *collaborative governance* penanganan stunting di UPTD Puskesmas Ciampel yang menunjukkan bahwa proses kolaborasi dalam penanganan stunting berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan adanya penurunan jumlah stunting di wilayah UPTD Puskesmas Ciampel. Penurunan prevalensi stunting yang terjadi baik secara global dan nasional merupakan wujud nyata dari upaya-upaya pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dalam menangani permasalahan gizi ini yaitu, stunting.

Terlibatnya berbagai sektor dalam kegiatan konvergensi penanganan stunting di Kota Palopo menyebabkan terjadinya penurunan jumlah kasus stunting di kota Palopo. Berdasarkan data e-PPGBM Kota Palopo, pada tahun 2021 sebanyak 421 kasus stunting menjadi 334 kasus pada tahun 2022. Pada tahun 2023 turun kembali menjadi 228 kasus stunting. Meskipun terjadi penurunan namun, berdasarkan hasil SSGI tahun 2022 angka stunting di Kota Palopo belum mencapai ketentuan nasional yaitu sebesar 23.8%.

Kolaborasi lintas sektor merupakan alat yang digunakan dalam menangani masalah multifactorial dan perencanaan dalam masyarakat (Nazaruddin, 2023). Faktor pemerintah, komitmen dan kinerja menjadi akselerator dalam percepatan penurunan stunting (Sirajuddin et al., 2022). Pelaksanaan penanganan stunting di Kota Palopo telah didukung dengan adanya koordinasi dan kerjasama oleh pemerintah dan perangkat daerah setempat. Pada pelaksanaannya serangkaian tantangan masih ditemukan di Kota Palopo salah satunya masalah penganggaran. Alokasi anggaran APBD merupakan faktor penting dalam menilai efektivitas upaya



stunting. Sebagian besar daerah di Indonesia mengalokasikan di atas Rp. 2 Miliar melalui APBD sedangkan Kota Palopo hanya anggaran sekitar Rp.500 Juta.

Salah satunya yang menjadi faktor penentu ialah sumber daya manusia atau tenaga pelaksana. Pelaksanaan program penanganan stunting di Kota Palopo yang melibatkan berbagai mitra menyebabkan masih banyak mitra yang kurang terlatih dan terampil dalam penanganan stunting. Keikutsertaan hanya sebagian mitra yang telah mengikuti pelatihan dan uji coba tahap tertentu. Setiap sektor berjalan dengan sendirinya

sehingga, tidak terjadi komunikasi antar sektor sedangkan keterlibatan berbagai mitra sangat dibutuhkan. Keterlibatan berbagai mitra pemerintah dalam kerangka kerja sama diharapkan dapat meningkatkan potensi sumber daya secara komprehensif dan konvergen dalam pencegahan stunting (Setiarsih et al., 2023). Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian terkait implementasi aksi konvergensi program percepatan penurunan stunting di Kota Palopo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka dirumuskan masalah penelitian ini yaitu bagaimana implementasi aksi konvergensi program percepatan penurunan stunting di Kota Palopo?.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di Kota Palopo.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu :

- Menganalisis konvergensi pada kondisi awal/*starting condition* (Misi, Sumber Daya dan Penganggaran) pada konvergensi lintas sektor penanganan stunting di Kota Palopo.
- Menganalisis pelaksanaan proses kolaborasi (Perencanaan, Struktur dan Tata Kelola, Peran Aktor) pada konvergensi lintas sektor penanganan stunting di Kota Palopo.
- Menganalisis kepemimpinan (Regulasi dan Komunikasi) pelaksanaan konvergensi lintas sektor penanganan stunting di Kota Palopo.
- Menganalisis output (Sinkronisasi Program) pelaksanaan konvergensi lintas sektor penanganan stunting di Kota Palopo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait konvergensi lintas sektor di bidang kesehatan karena, hasil yang diperoleh secara ilmiah. Selain itu, bisa menjadi salah satu rujukan mengenai kolaborasi lintas sektor bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi pihak terkait penanganan stunting di Kota Palopo

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang berguna bagi seluruh pihak yang terlibat, sebagai bahan evaluasi dalam upaya penanganan stunting di Kota Palopo.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi mengenai kolaborasi lintas sektor pada bidang kesehatan, khususnya mengenai masalah penanganan



merupakan salah satu langkah dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu penulis pelajari selama proses perkuliahan ke dalam bentuk tulisan

a

Umum Tentang Stunting

a) Definisi Stunting

Stunting merupakan masalah kesehatan yang tidak dapat disembuhkan namun dapat dicegah. WHO (2015) mendefinisikan bahwa stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak, anak yang didefinisikan stunting jika tinggi badan terhadap usia anak lebih dari dua standar deviasi di bawah median standar pertumbuhan anak WHO (WHO, 2015). Stunting mengacu pada pertumbuhan tinggi anak yang sangat lambat dan tidak normal berdasarkan tinggi atau panjangnya, hal ini merupakan efek kumulatif yang dihasilkan oleh kekurangan gizi kronis. Kondisi ini merupakan kondisi yang mewakili dimana anak-anak tidak dapat mencapai potensi pertumbuhan linear mereka secara penuh (Ahmed et al., 2023).

Stunting merupakan kondisi tinggi badan seseorang lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umunya (yang seusia). Pemerintah Indonesia dalam Perpres No. 72 Tahun 2021 mendefinisikan stunting sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, 2021). Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bahwa stunting adalah anak balita yang memiliki nilai z-scorenya kurang dari -2SD/standar deviasi (stunted) dan kurang dari - 3SD (severely stunted)(Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar Antropometri Anak, 2020).

b) Program Penanganan Stunting

Penanganan stunting yang dilakukan Indonesia tentu saja akan berbeda dengan penanganan stunting yang dilakukan di berbagai negara. Hal ini dikarenakan, di setiap negara memiliki faktor penyebab stunting yang berbeda. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan stunting bahwa, terdapat dua jenis intervensi yang dilakukan dalam aksi penanganan stunting ini yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif (Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, 2021). Intervensi spesifik merupakan intervensi yang terdiri dari kegiatan yang dilakukan oleh para *stakeholder* dan masyarakat dalam mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting, sedangkan intervensi sensitive merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting.

Pelaksanaan setiap jenis intervensi tentu saja berbeda. Intervensi spesifik menargetkan secara langsung untuk menuntaskan permasalahan gizi dengan meningkatkan nutrisi dan gizi, pemberian ASI eksklusif dan susu pertumbuhan, peningkatan dan perawatan kesehatan, pencegahan dan penanganan terhadap bayi yang memiliki berat lahir rendah, serta pemberian protein. Intervensi sensitif dilakukan secara tidak langsung namun memiliki pengaruh pada gizi atau sektor non-kesehatan dengan meningkatkan pendapatan dan perilaku, peningkatan kapasitas lingkungan, peningkatan dan kesejahteraan masyarakat, penggunaan metode, sistem aplikasi stunting, dan promosi kesehatan, pemenuhan pangan, jaminan kesehatan masyarakat, dan penanganan pada berbagai (Rahman et al., 2023). Pada pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitive sebagai bentuk upaya percepatan penurunan stunting dilakukan secara konvergen, holistic, integrative, dan berkualitas melalui a multisektor di tingkat pusat, daerah, dan hingga desa.



1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Kolaborasi Lintas Sektor

a) Definisi Kolaborasi Lintas Sektor

Kolaborasi atau *collaborative*, secara etimologi berasal dari kata *co* dan *labour* yang memiliki makna sebagai penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau disepakati bersama. Kolaborasi secara terminologi didefinisikan sebagai situasi dimana terjadinya kerja sama antara dua orang ataupun institusi atau lebih yang saling memahami permasalahan masing-masing secara bersama-sama dan berusaha untuk dapat saling membantu memecahkan permasalahan secara bersama-sama juga. Kolaborasi juga merupakan bentuk kerja sama yang intens yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan (Choirul, 2020). Bentuk kolaborasi yang terjadi saat ini dalam menangani permasalahan publik ialah kolaborasi lintas sektor.

Menurut Bryson dkk. (2006), kolaborasi lintas sektor merupakan penghubung untuk berbagi informasi, sumber daya, aktivitas, dan kemampuan organisasi pada dua sektor atau lebih dalam rangka mencapai hasil yang tidak dapat dicapai secara bersama-sama organisasi dalam satu sektor secara terpisah (Bryson et al., 2015). Kolaborasi lintas sektor merupakan kolaborasi yang terjadi apabila dua atau lebih organisasi bekerja secara bersama-sama baik lintas sektor industri, organisasi nirlaba, dan pemerintah dalam rangka mencapai hasil yang menguntungkan. Keberhasilan akan pelaksanaan kolaborasi dapat mengarah pada pembentukan kemitraan lintas sektor, dimana setiap sektor bermitra secara formal setuju untuk memanfaatkan sumber daya dan pendanaan yang dimiliki oleh mereka untuk mencapai tujuan bersama dan terukur (Hayes, 2020).

Konsep kolaborasi lintas sektor juga dikaitkan dengan istilah *collaborative governance*, meskipun hanya terjadi penggunaan istilah. Penggunaan istilah *crosssector collaboration* untuk menunjukkan adanya keterlibatan pihak pemerintah, swasta, lembaga nonprofitm lembaga charity, komunitas, dan institusi-institusi public secara keseluruhan. Pada umumnya, *collaborative governance* menggambarkan adanya interaksi antara individu atau organisasi, dan keterlibatannya terjadi secara sukarela (Ngambut, 2023). *Collaborative governance* juga merupakan proses dari struktur jejaring multiorganisasi lintas sektoral yang membuat kesepakatan bersama, keputusan bersama, pencapaian konsensus melalui interaksi formal maupun informal pembuatan dan pengembangan norma-norma dalam interaksi yang memiliki sifat saling menguntungkan dalam rangka mencapai tujuan bersama (Arrozaaq, 2016).

b) Model Kolaborasi Lintas Sektor

Pada dasarnya model kolaborasi lintas sektor atau *collaborative governance* merupakan hasil kajian keilmuan berbagai teori termasuk di dalamnya teori organisasi, teori administrasi publik, teori kepemimpinan, teori manajemen strategis, studi kebijakan, perencanaan dan studi manajemen lingkungan, teori jaringan, teori manajemen konflik, dan teori komunikasi.

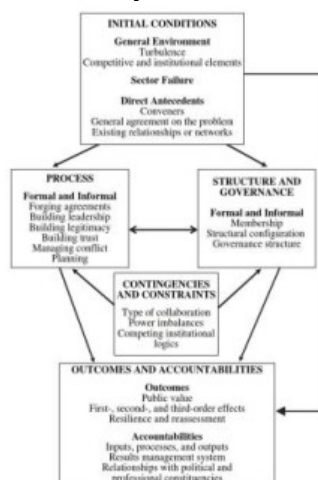
Teori ini mempengaruhi sudut pandang dan penekanan dalam kolaborasi lintas sektor atau *collaborative governance* dalam merumuskan model kolaborasi (Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, 2020).

Kolaborasi Bryson dan Crosby (2006)

Bryson (2006) mengenalkan model kolaborasinya dengan istilah *cross collaboration*. Pada model kolaborasi Bryson, terdapat beberapa tahapan pada aksi kolaborasi, tahapan proses dimulai dari kondisi awal, proses, struktur dan tata kelola, kontigensi dan kendala, hasil



dan akuntabilitas. Kolaborasi lintas sektor dapat dipahami dengan baik apa bila melihat penekanan terhadap lima komponen berikut (Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, 2020; Bryson et al., 2015):



Gambar 1

Model Kolaborasi Bryson dan Crosby (2006)

a. Kondisi Awal

Kondisi awal berfokus terhadap aspek yang lebih umum mengenai lingkungan dimana kolaborasi akan dilakukan, potensi kegagalan yang akan dihadapi dan syarat khusus yang harus dipenuhi untuk terbentuknya sebuah kolaborasi dengan cepat.

1) Faktor Lingkungan

Beberapa organisasi yang bekerja langsung seringkali terkait dengan kondisi lingkungan tertentu, sehingga ada kebutuhan untuk memiliki satu organisasi yang dapat mengoordinasikan dan menyatukan upaya dari organisasi-organisasi tersebut. Kolaborasi sangat tunduk terhadap tekanan yang bersifat kompetitif dan institusional yang secara signifikan dapat mempengaruhi keberlanjutan kolaborasi jangka panjang. Lingkungan kelembagaan mencakup elemen-elemen normatif, hukum, dan regulator yang harus dipatuhi oleh organisasi untuk mencapai legitimasi yang diperlukan untuk bertahan.

2) Kegagalan

Kolaborasi lintas sektor terjadi karena dipengaruhi oleh upaya untuk mengatasi masalah publik yang tidak dapat diselesaikan secara efektif oleh satu organisasi saja. Ketika sebuah organisasi tidak mampu menangani masalah publik tersebut sendirian, maka muncul keinginan untuk melibatkan organisasi lain guna membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Potensi yang dimiliki oleh sektor swasta dan publik dalam mengatasi kegagalan dianggap memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam penciptaan nilai-nilai publik.

Mekanisme Penghubung dari Pembentukan Kolaborasi

a) Organisasi perantara atau organisasi resmi dapat memfasilitasi pembentukam kolaborasi



Organisasi perantara umumnya memusatkan perhatiannya pada isu-isu publik yang penting dan memberikan legitimasi kepada berbagai kelompok pemangku kepentingan tertentu. Pemimpin yang diakui kredibilitasnya dianggap dapat memiliki kredibilitas dalam menyelesaikan masalah, serta mampu mengumpulkan beragam pemangku kepentingan untuk terlibat. Pemimpin dapat berasal dari individu yang memiliki kekuatan atau kekuasaan seperti, walikota atau kepala eksekutif dari organisasi, atau dari lembaga amal tertentu.

b) Kesepakatan awal mengenai masalah

Mekanisme penghubung yang penting adalah adanya kesepakatan awal mengenai definisi masalah. Perjanjian bisa menjadi alat yang efektif untuk mengklarifikasi kepentingan atau kebutuhan yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam menyelesaikan masalah sosial, serta sejauh mana organisasi tersebut memerlukan bantuan dari pihak lain untuk menyelesaikan masalah tersebut.

c) Peran Penghubung atau Jaringan

Peran penghubung atau jaringan yang tersedia menjadi krusial, karena sering kali melalui jaringan ini mitra-mitra mempercayai satu sama lain dan memberikan legitimasi kepada pemangku kepentingan utama. Para akademisi merujuk pada fenomena ini sebagai tingkat keterikatan struktural. Semakin banyak mitra yang berinteraksi secara positif di masa lalu, semakin memungkinkan koordinasi dan pertukaran terjadi. etika hubungan sebelumnya belum terjalin, kemitraan akan berkembang secara bertahap dan dimulai dengan kesepakatan informal kecil yang tidak memerlukan tingkat kepercayaan yang besar.

b. Komponen Proses

Pada proses kolaborasi terdapat beberapa komponen penting yang ditekankan, yaitu :

1) Membuat kesepakatan awal

Kesepakatan informal mengenai struktur, tujuan, dan proses kolaborasi bisa berhasil, namun kesepakatan formal memiliki keunggulan dalam memastikan akuntabilitas. Seiring dengan pertumbuhan kolaborasi dan penambahan mitra yang tersebar secara geografis dan memiliki peran yang beragam dalam domain masalah, kebutuhan untuk memiliki berbagai jenis perjanjian awal dan merevisi perjanjian tersebut cenderung meningkat. Elemen-elemen perjanjian formal mungkin mencakup tujuan yang lebih luas, mandat, komitmen sumber daya, penunjukan kepemimpinan formal, deskripsi anggota, struktur pengambilan keputusan, dan fleksibilitas untuk menanggapi kondisi dan perubahan lokal. <etidaksetujuan mitra terhadap tujuan bersama dapat menghambat kesepakatan langkah selanjutnya. Penelitian tentang kolaborasi menekankan pentingnya proses yang sangat partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan dan pelaksana utama. Mitra yang memiliki kekuatan yang tidak seimbang mungkin menghadapi lebih banyak kesulitan dalam memajukan kepentingan mereka dalam proses ini, meskipun manajer dapat menggunakan beberapa teknik untuk mengimbangi kekuatan.



2) Membangun kepemimpinan

Kolaborasi menyediakan berbagai macam peran bagi para pemimpin sektor formal dan informal. Posisi kepemimpinan formal dapat mencakup ketua bersama, komite pengarah, koordinator kolaboratif, atau direktur proyek. Agar efektif, orang-orang ini memerlukan otoritas formal dan informal, visi, komitmen jangka panjang untuk kolaborasi, integritas, dan keterampilan relasional dan politik

3) Membangun legitimasi

Organisasi akan berupaya memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk bertahan dan harus membangun legitimasi dengan memanfaatkan struktur, proses, dan strategi yang sesuai dengan lingkungannya. Tiga dimensi legitimasi yang diperlukan untuk jaringan: (1) legitimasi jaringan sebagai bentuk yang dapat menarik dukungan dan sumber daya internal dan eksternal; (2) legitimasi jaringan sebagai entitas yang dapat dikenali baik oleh orang dalam maupun orang luar; dan (3) legitimasi jaringan sebagai interaksi yang membangun kepercayaan di antara anggota untuk berkomunikasi secara bebas dalam jaringan.

4) Membangun kepercayaan

Kepercayaan merupakan inti dari kolaborasi. Kepercayaan terdiri dari perilaku interpersonal, kepercayaan dalam kompetensi organisasi dan kinerja yang diharapkan, serta ikatan yang sama dan niat baik. Kerja sama dapat membangun kepercayaan dengan cara berbagi informasi dan pengetahuan, menunjukkan kompetensi, niat baik dan adanya tindak lanjut terhadap kegiatan. Sebaliknya, kegagalan kolaborasi terjadi bila adanya tindakan melemahkan kepercayaan

5) Mengelola konflik

Konflik dalam kerja sama tim timbul dari perbedaan tujuan dan harapan yang dibawa oleh masing-masing anggota tim, dari sudut pandang yang berbeda mengenai strategi dan taktik, serta dari usaha untuk menjaga atau meningkatkan kendali atas pekerjaan atau hasil kerja sama. Selain itu, misi dari kerja sama juga bisa memengaruhi tingkat konflik.

6) Perencanaan

Perencanaan dalam proses kolaborasi dapat dilihat dengan melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan yang menekankan pada perencanaan formal, hal ini dinilai juga sebagai bentuk keberhasilan awal sebuah kolaborasi. Kunci sukses pada pendekatan perencanaan ini karena menjelaskan tentang misi dan tujuan; peran dan tanggung jawab; fase atau langkah, termasuk implementasinya. Pendekatan kedua berpendapat bahwa pemahaman yang jelas tentang misi, tujuan, peran, dan langkah-langkah atau tindakan lebih mungkin muncul dari waktu ke waktu karena adanya percakapan yang melibatkan individu, kelompok, dan organisasi, serta mencakup jaringan yang lebih luas dari pihak-pihak yang terlibat atau yang terpengaruh.

Struktur dan Tata Kelola

Struktur merupakan konsep yang sangat vital dalam teori organisasi, yang umumnya mencakup aspek-aspek seperti tujuan, spesialisasi tugas, pembagian kerja, aturan, standar prosedur operasi,



dan hubungan otoritas. Struktur organisasi meliputi dimensi vertikal dan horizontal. Secara keseluruhan, struktur membantu organisasi untuk membedakan dan mengintegrasikan seluruh elemen yang ada yang terdiri dari, konteks struktur, konfigurasi structural, dan tata kelola.

d. Kontigensi dan Kendala

Terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi proses, struktur, tata kelola, hingga keberlanjutannya secara keseluruhan antara lain :

1) Jenis kolaborasi

Terdapat perbedaan di antara jenis kolaborasi, antara lain: kolaborasi yang dibentuk pada level perencanaan (mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah dan solusi), kolaborasi pada kegiatan administrasi (melibatkan transaksi sumber daya, seperti pembagian staf), atau kolaborasi saat pemberian layanan (seperti perjanjian sebagai rujukan anggota). Kolaborasi dalam kegiatan pemberian layanan lebih sering dilakukan dan lebih mudah dipertahankan daripada kolaborasi dalam kegiatan perencanaan perubahan sistem atau kebijakan seperti proses kebijakan publik, karena terjadi negosiasi yang cukup rumit dan dibutuhkan solusi yang kreatif. Kolaborasi yang melibatkan anggota pada level manajer/ pimpinan administratif lebih rentan terhadap adanya konflik, sedangkan mereka yang melaksanakan pada level staf pelayanan biasanya akan lebih mudah berkolaborasi dan bekerja sama.

2) Ketidakseimbangan kekuatan di antara anggota

Ketidakseimbangan kekuatan di antara mereka yang berkolaborasi sebagai sumber ketidakpercayaan, hal ini merupakan ancaman bagi efektifitas sebuah kolaborasi. Ketidakseimbangan kekuasaan menjadi sangat signifikan ketika anggota mengalami kesulitan untuk menyetujui tujuan bersama. Selain itu, seiring berjalannya waktu, kolaborasi kemungkinan akan mengalami guncangan baik dari dalam maupun dari luar yang mempengaruhi hubungan di antara anggota, sumber daya, dan bahkan tujuan kolaborasi.

3) Persaingan logika kelembagaan

Membangun legitimasi, kepemimpinan, dan kepercayaan, bersama dengan mengelola konflik, menjadi lebih kompleks dalam kolaborasi multi sektor karena kemungkinan anggota mewakili dan memberlakukan logika kelembagaan yang mereka bawa. Logika kelembagaan/ institusional adalah pola historis tingkat makro, baik simbolis maupun material, yang menetapkan aturan formal dan informal dalam memberikan interpretasi terhadap tindakan. Logika birokrasi negara menyangkut regulasi aktivitas manusia dan mencakup hierarki hukum dan birokrasi, aturan, dan SOP. Sedangkan logika demokrasi menekankan kontrol atas aktivitas manusia dan partisipasi warga negara dengan simbol sistem pendukung seperti asosiasi sukarela. Logika kelembagaan asal dari anggota akan mempengaruhi perilaku dalam memusatkan perhatian pembuat keputusan penyelesaian masalah, hasil, dan sumber daya. Logika yang dibawa anggota akan dianggap sebagai alat yang esensial untuk desain proses kolaborasi, struktur, tata kelola, dan hasil yang diinginkan.

sil dan Akuntabilitas

-hasil

a) Nilai Publik



Nilai publik dalam kolaborasi lintas sektor kemungkinan besar diciptakan dengan memanfaatkan kekuatan karakteristik masing-masing sektor sambil juga menemukan cara untuk meminimalkan, mengatasi, atau mengkompensasi kelemahan karakteristik masing-masing sektor.

b) Efek Pertama, Kedua, dan Ketiga

Upaya perencanaan kolaboratif memiliki efek positif pertama, kedua, dan ketiga. Efek pertama segera terlihat sebagai hasil langsung dari proses kolaborasi, antara lain penciptaan modal sosial, intelektual, dan politik; perjanjian yang berkualitas; dan strategi yang inovatif. Efek kedua cenderung terjadi ketika kolaborasi berjalan dengan baik, atau mungkin terjadi di luar batas upaya formal, diantaranya termasuk lahirnya kemitraan baru, koordinasi dan aksi bersama, pembelajaran bersama yang melampaui kolaborasi itu sendiri, implementasi perjanjian, perubahan dalam praktik, dan perubahan dalam persepsi. Akhirnya, efek ketiga mungkin tidak segera terbukti sampai beberapa waktu kemudian, misalnya, kolaborasi baru; lebih banyak co-evolusi dan konflik yang kurang merusak di antara para anggota; hasil di lapangan, seperti adaptasi layanan, sumber daya, kota dan wilayah; institusi baru; norma dan heuristik sosial baru untuk mengatasi masalah publik; dan mode wacana baru.

c) Ketahanan dan Penilaian Kembali

Kegagalan dalam mencapai hasil yang diinginkan dapat mengikis dukungan terhadap kolaborasi, tetapi keberhasilan juga dapat menyebabkan pendukung melupakan kebutuhan untuk mempertahankan kolaborasi tersebut. Jika keberhasilan yang besar tidak dimungkinkan, kolaborasi harus mengatur keberhasilan yang kecil menjadi strateginya dalam mempertahankan kolaborasi. Baik besar atau kecil, keberhasilan harus dipublikasikan. Setelah keadaan sudah saling menguntungkan, para pemimpin harus menilai apakah kolaborasi itu harus dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan.

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam berkolaborasi merupakan permasalahan yang kompleks karena tidak jelas kolaborasi tersebut bertanggungjawab kepada siapa dan untuk apa. Anggota yang berkolaborasi atau para pemangku kepentingan bisa memiliki persepsi yang berbeda dalam menilai hasil yang dicapai. Akuntabilitas dapat berkaitan dengan input, proses, atau hasil. Tiga kriteria umum yang digunakan untuk menilai keberhasilan kolaborasi lintas sektor antara lain:

a) Kondisi awal

b) Pemenhan keinginan para anggota

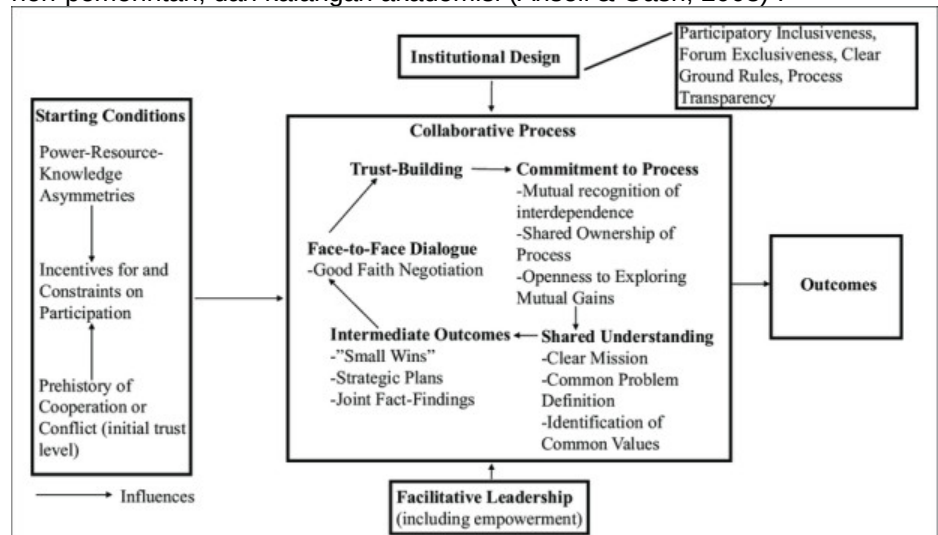
c) Kehadiran hasil/kebijakan alternative yang lebih baik yang dapat menciptakan nilai publik

Ansell dan Gash (2008)

ra mendasar, model kerangka kerja collaborative governance suatu metode dalam mengambil keputusan. Seperti yang telah kan sebelumnya oleh Ansell dan Gash, collaborative governance suatu pendekatan dalam merumuskan kebijakan publik yang tkan proses konsensus. Selain itu, Ansell dan Gash juga



menjelaskan berbagai pihak yang terlibat dalam proses collaborative governance, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan kalangan akademisi (Ansell & Gash, 2008) :



Gambar 2

Model Kolaborasi Ansell dan Gash (2008)

Pengembangan kerangka kerja proses kolaborasi yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008) diatas, kolaborasi terdiri dari empat tahapan yaitu (Muhammad Noor, Fahih Suaedi, 2022) :

a. Starting Condition

Starting condition ialah tahapan dalam menjelaskan dua isu yang penting. Isu tersebut ialah ketidakseimbangan sumber daya yang dimiliki oleh setiap stakeholder serta intensive agar ikut serta berpartisipasi. Jika sumber daya dan kekuatan yang dimiliki oleh setiap pemangku kepentingan tidak seimbang, maka kerjasama dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak yang memiliki sumber daya dan kekuatan yang lebih besar. Oleh karena itu, penting untuk ada komitmen dalam membantu pemangku kepentingan yang lebih lemah jika situasi tersebut terjadi. Selain itu, insentif juga diperlukan agar pemangku kepentingan yang kurang kuat dapat tetap berkontribusi dalam kerjasama dengan tekun. Terakhir, antisipasi terhadap potensi konflik dalam kerjasama perlu dilakukan, dan ini mencakup pembangunan rasa saling percaya di awal antara semua pihak yang terlibat.

b. Facilitative Leadership

Facilitative leadership atau memfasilitasi adanya kepemimpinan. Tahapan pada proses kolaborasi perlunya fungsi jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh para aktor (Ansell & Gash, 2008). Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas interaksi, menjaga kepercayaan sesama aktor, sehingga tidak ada perasaan rugi diantara aktor, dan memfasilitasi forum diskusi.



Institutional design merupakan aturan main yang sangat fundamental di dalam proses kerjasama dan merupakan sifat dari institusi tersebut haruslah terbuka.

d. Collaborative Process

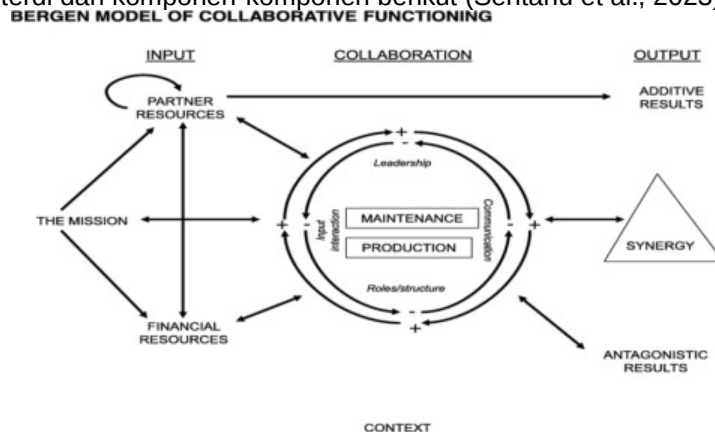
Collaborative process dilaksanakan dalam rangka membangun tahapan kolaborasi yang dibuka dengan dialog tatap muka secara berkonsensus. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa saling percaya antar aktor, perasaan bertanggung jawab aktor dalam rangka menciptakan kondisi kesepahaman bersama. Tujuan akhirnya untuk menemukan titik terang atau solusi dari suatu permasalahan yang dihadapi.

e. Intermediate Outcomes

Intermediate outcomes menjelaskan bahwa proses kolaborasi dianggap berhasil apabila pada perjalanan telah dikerjakan beberapa kegiatan bersama dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Selanjutnya, pencapaian tujuan yang telah disepakati secara bersama akan tercapai, dan pencapaian tersebut akan lebih baik daripada alternatif lainnya. Proses ini akan terus berlanjut sesuai dengan alur kolaborasi yang telah disetujui. Meskipun hasil interim telah menghasilkan dampak yang nyata, namun proses yang mengarah pada dampak tersebut adalah esensi yang membangun momentum menuju kesuksesan kolaborasi. Hasil interim tidak boleh dianggap sebagai hasil akhir, karena proses tersebut masih berkelanjutan

3. Model Kolaborasi Bergen (2008)

Model kolaborasi Bergen mampu membantu untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi dan memahami mekanisme yang ada (Tell et al., 2022). Bergen Model atau yang dikenal dengan BMCF (Bergen Model of Collaborative Functioning) merupakan model sistem yang terdiri dari komponen-komponen berikut (Sentanu et al., 2023) :



Gambar 3
Model BMCF



kemampuan, pengetahuan, kekuasaan, komitmen, dan atribut lainnya yang berkontribusi oleh sumber daya manusia terhadap kolaborasi. Sumber daya finansial mencakup semua investasi material dalam proses kolaborasi.

b. Throughput

Throughput merupakan kolaborasi itu sendiri atau konteks kolaboratif. Komponen-komponen dari input yang memasuki konteks kolaboratif dan berinteraksi secara positif maupun negatif selamam proses kerja kegiatan pemeliharaan dan produksi. Kegiatan pemeliharaan terkait dengan tugas-tugas administratif yang berperan dalam memastikan lingkungan kerja yang positif. Ini melibatkan perencanaan, hubungan sosial yang baik, dan pencapaian tujuan. Pada sisi lain, kegiatan produksi berkaitan dengan misi kolaboratif yang langsung memengaruhi hasil atau output. Pada proses throughput ini dipengaruhi oleh interaksi antar input yang terlibat dalam kerja kolaborasi, kepemimpinan, peran/struktur dan prosedur, serta komunikasi.

c. Output

Output merupakan keluaran atau produk yang dihasilkan dari kegiatan kolaborasi. Output pada konteks kolaboratif dapat berupa sinergi, aditif, maupun antagoni atau hasil antagonik.

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Aksi Konvergensi

Aksi kolaborasi lintas sektor pada penanganan stunting sendiri lebih dikenal dengan istilah konvergensi. Konsep konvergensi dapat diterapkan pada banyak kebijakan, institusi suatu politik, sebuah konsitusi, suatu preferensi politik, serta hasil kebijakan (Saputri, 2019). Konvergensi merupakan pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan Bersama-sama untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas (Stunting, 2020). Pada program stunting sendiri aksi konvergensi merupakan instrument dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan intervensi gizi dalam penurunan stunting melalui 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting (Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Kementerian Dalam Negeri, 2023).

Konvergensi lintas sektor telah menjadi program strategi kunci dalam percepatan penurunan stunting. Pada aksinya, pelaksanaannya melibatkan berbagai sektor dalam penanganan stunting. Hal ini dikarenakan akar penyebab terjadinya stunting berasal dari berbagai sektor sehingga, penanggulangannya memerlukan kolaborasi lintas sektoral. Oleh karena itu, partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam penurunan stunting menyadari perlunya upaya koordinasi baik horizontal dan vertikal yang terintegrasi. Aksi konvergensi stunting ini tidak terbatas pada proses kolaborasi belaka. Lebih dari itu, merupakan sebuah rangkain yang terintegrasi secara menyeluruh yang terdiri dari *Starting Condition*, Proses Kolaborasi, *Leadership*, hingga Output yang diharapkan pada aksi kolaborasi lintas sektor.



1.6 Sintesa Penelitian

Tabel 1 Sintesa Penelitian

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Sampel	Hasil
1	Farianingsih ,Ma'rufi and Rokhmah, (2019) Jurnal	Study of The Role of Government and Community Participation in Stunting Countermeasures System in Lumajang Regency	Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, FGD, dan Review dokumen.	Informan terdiri dari kepala puskesmas dan 4 orang ibu balita stunting. Peserta FGD terdiri dari 29 pemangku kepentingan yang terdiri dari Kepala Desa, Lurah, Ketua PKK, Babinsa, Koordinator Kader, Kader Posyandu, Pendamping PKH, Ketua Masyarakat, Ketua Aisyiyah, Bidan Desa, Perawat Desa, Ahli gizi, dan aparat pemerintah desa.	Peran pemerintah dalam menangani stunting masih kurang optimal. Beberapa aspek yang belum optimal termasuk intervensi dari Puskesmas dan pemangku kepentingan, penganggaran yang belum memadai, kerjasama antar sektor yang masih terbatas, serta penyuluhan program gizi yang belum mencukupi. Saat ini, partisipasi masyarakat masih kurang, seperti peran organisasi masyarakat yang minim, rendahnya partisipasi dalam program penanganan stunting, kurangnya penyuluhan tentang gizi, kurangnya upaya dari ibu dalam pemenuhan gizi anak, serta kurangnya pendampingan dari kader/ormas/PKK.
		Factors Influencing Delivery of Intersectoral Actions to Address Infant Stunting in Bogota	Metode konkuren dengan desain penelitian metode campuran (Kualitatif-Kuantitatif). Pengumpulan data dilakukan dengan lokakarya, FGD, wawancara semi	Pada FGD terdapat 4 peserta yang merupakan perwakilan dari sektor kesehatan, sosial, pendidikan, dan swasta. Pada wawancara semi	Pencegahan stunting membutuhkan aksi antar sektor sebagai inti. Studi kasus di Bogota, Kolombia terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi aksi antar sektor. Meskipun pada



	Jurnal	, Colombia- A Mixed Methods Case Study	terstruktur, dan pengisian kuesioner.	terstruktur informan terdiri dari 3 informan perwakilan asuransi kesehatan, 1 informan perwakilan pemerintah kota, dan 2 informan perwakilan bidang pendidikan. Terdapat 124 responden pada penelitian kuantitatif.	pelaksanaannya aksi antar sektor dihargai namun, ditemukan kurangnya koordinasi dan keterampilan manajemen antar sektor.
3	B, Sofyan and Walinegoro, (2022) Prosiding	Stunting Prevention Through Collaborative in The Berbah Sub-District, Sleman	Penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Informan penelitian terdiri dari, Pemerintah Kecamatan, Pusat kesehatan masyarakat, Pemerintah desa, Tim Mobilisasi Kesejahteraan Keluarga, kader kesehatan.	Tata kelola yang kolaboratif dalam menangani stunting di Kecamatan Berbah telah diterapkan dengan baik. Namun, karena dampaknya sulit diukur secara langsung, bersifat sementara, dan terus berubah, maka kerjasama tersebut harus terus diperkuat dan dikembangkan melalui evaluasi. Tantangannya termasuk kurangnya forum komunikasi yang efektif di pemerintah kecamatan untuk pengawasan strategis, alokasi anggaran yang terbatas, minimnya partisipasi dari swasta dan perguruan tinggi, serta keterbatasan keterlibatan masyarakat.
		Collaboration Of Actors In The	Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Informan penelitian terdiri dari perwakilan	Kerjasama antar pelaku dalam program pencegahan stunting di



	Jurnal	Network In Stunting Prevention Programs In Bulukumba District	Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi.	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas P3A, dan organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam pencegahan stunting di Bulukumba	Kabupaten Bulukumba masih berlangsung. Karena tingginya permasalahan stunting, kolaborasi antar aktor dalam jaringan sangat diperlukan untuk mencapai penurunan stunting. Kolaborasi ini terjadi melalui komunikasi langsung, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan evaluasi terhadap hasil dalam pencegahan stunting
5	Imron <i>et al.</i> (2022) Jurnal	Sinergi Lintas Sektor Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur	Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam menggunakan FGD dan dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman.	Informan terdiri dari perangkat desa, bidan desa, dan penyuluh KB	Peran sosial antar aktor dalam konteks tata kelola kolaboratif dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Ngajuk cukup efektif. Pemerintah desa berperan dalam merumuskan kebijakan penganggaran melalui alokasi dana desa. Bidan dan penyuluh KB bekerja sama merumuskan program yang efektif untuk penanganan stunting. Dilakukan juga pendampingan terhadap keluarga stunting dan berisiko stunting namun, masih dihadapkan pada konstruksi pengetahuan dan perilaku orang tua mengenai pola asuh anak yang masih lemah.



6	Pangkey <i>et al.</i> , (2022)	Collaborative Governance in Stunting Management in Bolaang Mongondow District	Penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Informan terdiri dari perwakilan komunitas bakti sosial, komunitas pemberdayaan perempuan, Dinas Pendidikan, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan Pelayanan komunikasi dan informasi	Proses tata kelola kolaboratif melalui dialog tatap muka belum memperoleh kerjasama dengan sektor swasta dalam mengatasi stunting. Masih terdapat kekurangan kepercayaan di antara pemangku kepentingan, yang menjadi langkah awal dalam kolaborasi. Komitmen dipengaruhi oleh pengakuan, penghargaan, kepercayaan, rasa memiliki, dan ketergantungan antar aktor. Pemerintah desa juga perlu lebih terlibat dalam upaya mengatasi stunting. Pemahaman bersama untuk mencapai tujuan bersama perlu ditingkatkan melalui rapat koordinasi yang diadakan dua kali setahun. Meskipun belum optimal, upaya untuk mengatasi stunting terus dilakukan.
	Afandi <i>et al.</i> , (2023)	Collaborative Governance in a Mandated Setting: Shifting Collaboration in Stunting Interventions at local level	Penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dokumentasi, observasi, dan wawancara.	Informan berjumlah 23 orang yang terdiri dari, pemerintah provinsi, Pemerintah kabupaten, Pemerintah desa, Kader posyandu, Organisasi non-profit, Swasta, media, dan akademisi.	Tindakan konvergensi adalah permintaan dari pemerintah pusat Indonesia kepada pemerintah daerah untuk bekerja sama dalam mengatasi stunting. Implementasinya telah dimulai di Jawa Barat, namun mayoritas prosesnya masih dipegang oleh lembaga pemerintah, dengan sedikit partisipasi dari pihak non-pemerintah. Dalam perspektif tata



					kelola kolaboratif, tindakan konvergensi memiliki struktur kelembagaan yang sudah ditetapkan, melibatkan proses kolaboratif antara pemerintah dan pihak non-pemerintah, kepemimpinan yang mendukung, dan jaminan akuntabilitas yang jelas. Namun, partisipasi pihak non-pemerintah belum maksimal, sehingga setiap aspek perlu ditingkatkan.
8	Waliyudin, Widianingsih and Susanti, (2022) Jurnal	Koordinasi Dalam Upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Kuningan	Penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka.	Informan pada penelitian ini ialah perwakilan SKPD yang ikut serta dalam Tim Penanggulangan Stunting Kabupaten Kuningan.	Koordinasi dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kuningan belum berjalan secara efektif. Di mana hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan koordinasi yang dilakukan belum sepenuhnya memenuhi aspek-aspek yang terdapat dalam teknik koordinasi yang efektif. Faktor penghambat pelaksanaan koordinasi belum adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara SKPD yang terlibat, sering terjadi perubahan keanggotaan, belum ada SOP, adanya keterbatasan dari sesi pendanaan, manajemen



					pengelolaan dana yang belum optimal.
9	Fatikha and Permatasari (2023) Jurnal	Collaborative Governance Penanganan Stunting	Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumen, dan studi kepustakaan.	Informan terdiri dari Kepala UPTD Puskesmas Ciampel, Bidan, Kepala Desa, Wakil Kepala Desa, Kader Posyandu, dan Perwakilan Sektor Swasta yang bekerjasama dalam penanganan stunting	Proses kolaborasi dalam penanganan stunting di UPTD Puskesmas Ciampel sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditandai dengan adanya penurunan jumlah stunting di wilayah UPTD Puskesmas Ciampel. Proses kolaborasi telah melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta meskipun keterlibatan masyarakat belum maksimal
10	Niga, (2023) Jurnal	Collaborative Governance in an Effort to Reduce Stunting Rate in TTS District, NTT Province	Penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan penelusuran dokumen.	Informan berjumlah 76 informan.	Tata kelola kolaboratif dalam upaya mengurangi angka stunting di Kabupaten TTS Provinsi NTT dalam pelaksanaannya belum ada keputusan bersama dalam menurunkan angka stunting, masih terdapat masalah integrasi data, kurangnya pemahaman berbagai pihak yang bekerja sama mengenai indikator angka stunting, kurangnya ketergantungan antar aktor secara lembaga, serta kurangnya kepercayaan dan kerjasama dalam mengkoordinasikan upaya



					penurunan angka stunting di Kabupaten TTS Provinsi NTT.
11	Purnomo <i>et al.</i> , (2023) Jurnal	Optimalisasi Multi-Pihak Untuk Percepatan Penurunan Stunting di Kota Salatiga Dalam Peluang dan Tantangan	Penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi, serta studi dokumen.	Informan terdiri dari perangkat desa, bidan desa, dan penyuluh KB.	Kolaborasi multi-pihak berjalan dengan baik oleh pihak di Kota Salatiga namun perlu ditingkatkan untuk mencapai target penurunan stunting.
12	Azzahra <i>et al.</i> , (2023) Jurnal	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Kolaborasi Interprofesi dan Lintas Sektor Dalam Intervensi Prioritas Penurunan Stunting Di Wilayah Puskesmas Ujungpangkah	Penelitian kuantitatif dengan analitik observasional dengan pendekatan cross-sectional.	Sampel merupakan total sampling yang terdiri dari 145 orang (bidan desa dan bidan puskesmas), perawat, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, promotor kesehatan, perangkat desa (Kepala Desa, Staf Bidang Kesra, Kepala Dusun, dan Ketua RT), kader posyandu, tim PKK, dan petugas lapangan keluarga berencana	Praktik kolaborasi interprofesi dan lintas sektor dalam intervensi prioritas penurunan stunting di Desa Pangkahkulon sudah berjalan meski perlu ditingkatkan. Faktor personal yang berpengaruh adalah kerja sama dan kemampuan berkomunikasi sedangkan faktor situasional yang berpengaruh ialah pemberdayaan dan kondisi sumber daya.
		Cross-Sector Collaboration in Intervention to Prevent and Reduce Stunting	Penelitian merupakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara,	Informan penelitian terdiri dari perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.	Pelaksanaan program intervensi telah berjalan secara maksimal namun, belum melakukan perubahan besar pada penanganan stunting. Pada aksi kolaborasi pemerintah daerah belum



	Jurnal	in Penajam Paser Utara District	dokumentasi, dan studi pustaka		memaksimalkan peran dan tugasnya sesuai dengan pedoman dan peraturan yang telah ditetapkan.
14	Widyowati and Utomo, (2023) Jurnal	Tata Kelola Kolaboratif dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Wonogiri	Penelitian merupakan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.	Informan penelitian terdiri dari perangkat daerah yang terlibat dalam kolaborasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Wonogiri, TP PKK, dan masyarakat Kabupaten Wonogiri.	Kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri sudah sesuai dengan mandat atau peraturan terkait percepatan penurunan stunting. Faktor yang mendukung proses kolaborasi antara lain dialog tatap muka, intensifikasi kepercayaan yang sudah terbangun, komitmen berkelanjutan berbagai program serta pemahaman bersama yang terjalin sedangkan faktor penghambat disebabkan oleh kurangnya keterlibatan aktif sektor swasta, serta kendala sanitasi yang belum teratasi.
	Wigati and Ciptanurani, (2023)	Policy Triangle Analysis of Stunting Issues in Urban Areas : A case Study Of Yogyakarta City	Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui tinjauan pustaka dan FGD.	Peserta FGD terdiri dari perwakilan Bappeda, 2 staff Dinas Kesehatan, dan Staff DP3AP2KB kota Yogyakarta.	Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmennya dengan menerapkan kerangka peraturan untuk mendukung intervensi stunting. Masih ditemukan faktor-faktor kompleks yang saling berinteraksi yang dapat menghambat.

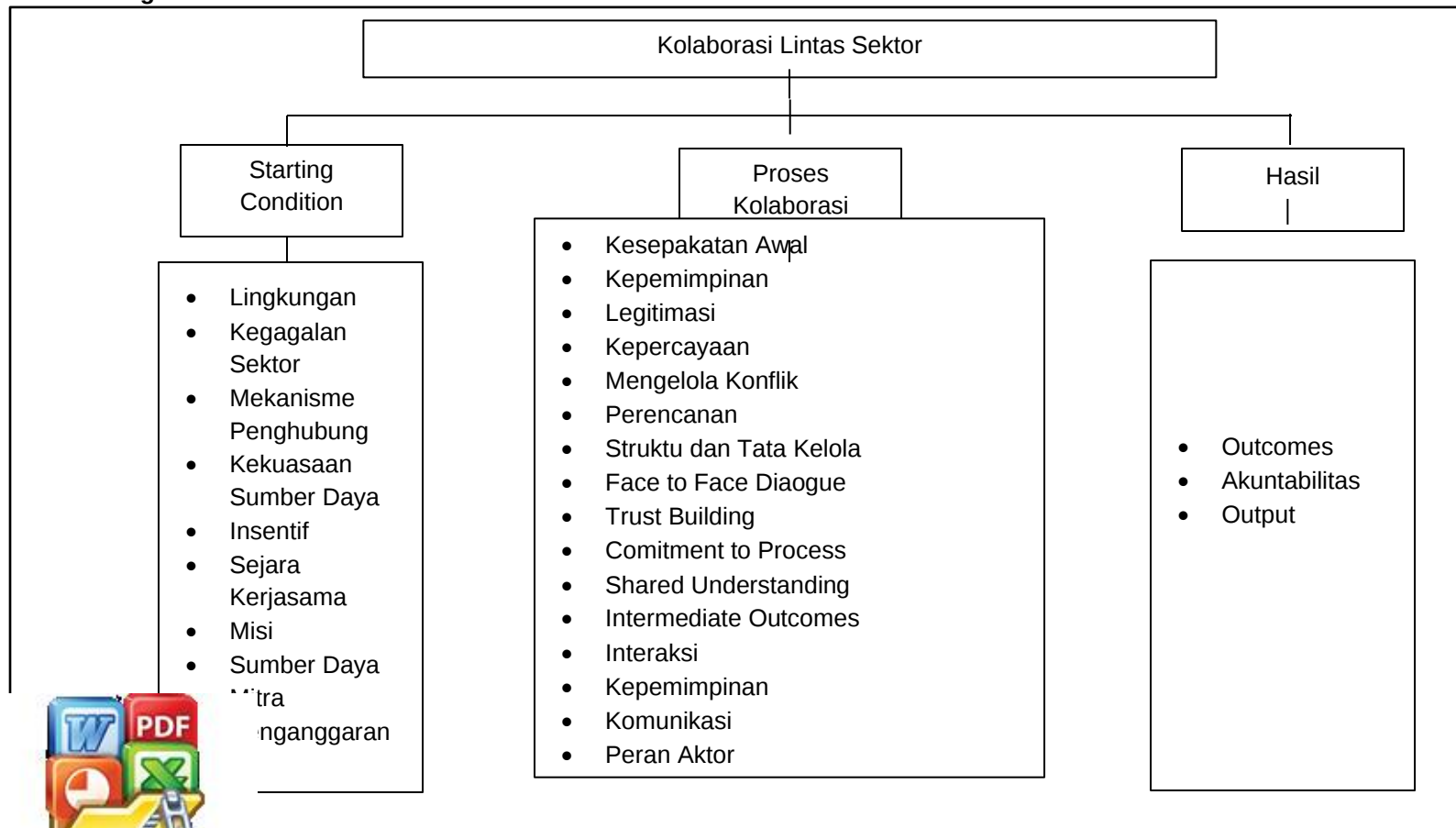


Kesimpulan Sintesa :

Berdasarkan tabel sintesa sebelumnya diketahui bahwa metode yang digunakan keseluruhan penelitian yang meninjau gambaran kolaborasi pemerintah dalam penanganan stunting ialah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Teori kolaborasi yang digunakan seluruh penelitian di atas ialah teori Collaborative Governance oleh Ansell dan Gash (2008). Variabel yang diteliti pada penelitian yang terdapat tabel sintesa ialah variabel yang terdapat dalam teori Ansell dan Gash (2008). Beberapa hal yang dapat ditemukan dalam tabel sintesa sebelumnya, dapat diketahui bahwa, dalam proses kolaborasi permasalahan yang paling besar adalah peran atau keterlibatan aktor dalam aksi konvergensi lintas sektor penanganan stunting. Hal ini didasari karena, ketidakmampuan berbagai pihak dalam memahami peranannya sebagai aktor yang ikut serta dalam konvergensi lintas sektor penanganan stunting



1.7 Kerangka Teori

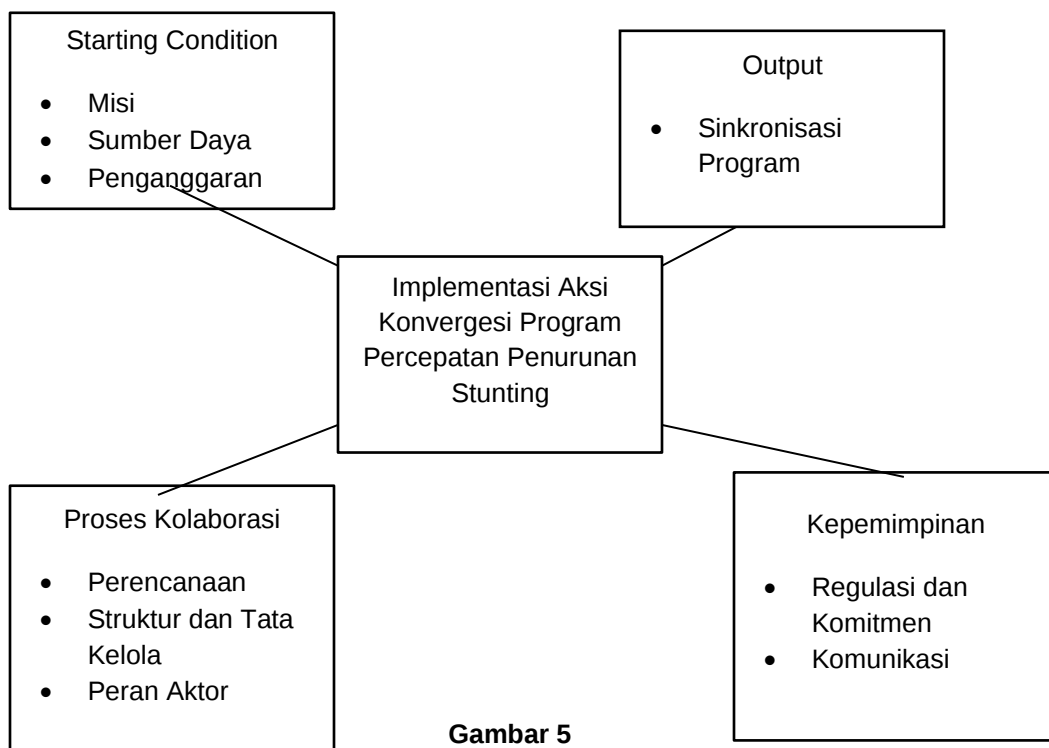


1.8 Kerangka Konsep

Berdasarkan landasam teori yang digunakan, maka dapat disimpulkan bahwa kerangka konsep penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti merupakan modifikasi tiga model teori kolaborasi lintas sektor. Pada penelitian ini dapat dijelaskan definisi konsep sebagai berikut :

- a. Konvergensi lintas sektor merupakan merupakan kolaborasi yang terjadi apabila dua atau lebih organisasi bekerja secara bersama-sama baik lintas sektor industri, organisasi nirlaba, dan pemerintah dalam rangka mencapai hasil yang menguntungkan dalam hal ini menyelesaikan permasalahan kesehatan public secara bersama-sama.
- b. Pelaksanaan kolaborasi lintas sektor pada penelitian ini dimulai dari starting condition atau kondisi awal kolaborasi lintas sektor dengan indikator sebagai berikut :
 - 1) Misi merupakan tujuan dilaksanakannya konvergensi lintas sektor.
 - 2) Sumber Daya Mitra merupakan kondisi sumber daya manusia yang terlibat dalam konvergensi lintas sektor. Kondisi sumber daya manusia tersebut dapat berupa pengetahuan dan *power*.
 - 3) Penganggaran merupakan ketersediaan biaya khusus yang dimiliki oleh tim TPPS dalam aksi konvergensi penanganan stunting.
- c. Pelaksanaan proses kolaborasi lintas sektor penelitian ini dimulai dari indikator sebagai berikut :
 - 1) Perencanaan merupakan gambaran pelaksanaan konvergensi yang akan dilakukan mencakup ketersediaan strategi dan rencana aksi.
 - 2) Struktur dan Tata Kelola keterlibatan antarlembaga dalam program kelembagaan program penanganan stunting di Kota Palopo.
 - 3) Peranan Aktor merupakan fungsi atau tugas aktor kolaborasi dalam pelaksanaan kolaborasi lintas sektor.
- d. Leadership
 - 1) Regulasi merupakan aturan dalam pelaksanaan konvergensi lintas sektor penanganan stunting di Kota Palopo yang mendorong terlaksananya aksi konvergensi pada setiap sektor.
 - 2) Komunikasi bentuk komunikasi yang digunakan dalam kolaborasi lintas sektor yang berkaitan dengan penyampaian informasi dan koordinasi.
- e. Output
 - 1) Sinkronisasi Program merupakan kesesuaian program yang dilaksanakan berbagai sektor dengan penanganan stunting di Kota Palopo.





Gambar 5
Kerangka Konsep

1.9 Definisi Konseptual

Tabel 2 Definisi Konseptual

No	Variabel	Definisi Konseptual
1	Konvergensi	Pendekatan yang melibatkan berbagai sektor dalam pelaksanaan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama.
2	Starting Condition	Misi : Persamaan persepsi mengenai satu kesatuan tujuan dilaksanakannya aksi konvergensi. Sumber Daya Mitra : Kondisi sumber daya manusia yang terlibat dalam kolaborasi lintas sektor. Dalam hal ini berkaitan dengan : • Pengetahuan : Setiap sektor mengetahui keikutsertaannya dalam aksi konvergensi penanganan stunting • Power : Setiap sektor memahami kekuasaan yang dimiliki yang dapat berkontribusi dalam aksi konvergensi penanganan stunting Penganggaran : Ketersediaan anggaran khusus yang dimiliki oleh tim TPPS dalam



		pelaksanaan aksi konvergensi lintas sektor.
3	Proses Kolaborasi	Perencanaan : Gambaran pelaksanaan kolaborasi yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini berupa ketersediaan strategi dan rencana aksi setiap sektor dalam aksi konvergensi penanganan stunting.
		Struktur dan Tata Kelola : Integrasi seluruh komponen atau elemen kolaborasi lintas sektor. Dalam hal ini ada tidaknya mekanisme pengambilan keputusan dalam hal yang terkait dengan aksi konvergensi lintas sektor penanganan stunting.
		Peran Aktor : Fungsi atau tugas aktor dalam pelaksanaan penanganan stunting.
4	Kepemimpinan	Regulasi dan Komitmen : Ketersediaan regulasi sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk mendorong terlaksananya proses konvergensi lintas sektor penanganan stunting.
		Komunikasi : Gambaran komunikasi yang dalam dalam penyampaian informasi dan koordinasi aksi konvergensi lintas sektor.
5	Output	Sinkronisasi Program : Tersedianya kesesuaian program penanganan stunting pada setiap sektor yang terlibat berdasarkan peran masing-masing setiap sektor.



BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2018) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mencari makna suatu fenomena yang berasal dari pandangan-pandangan para informan atau partisipan penelitian. Penelitian kualitatif lebih memberikan fokus kepada elemen objek, manusia, dan institusi, serta hubungan atau interaksi dengan elemen lainnya untuk memahami suatu peristiwa maupun fenomena yang terjadi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi dari aksi konvergensi program percepatan penurunan stunting. Maka sangat diperlukan analisis untuk mengidentifikasi pelaksanaan program percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai sektor.

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dilakukan untuk mempermudah dan memperjelas lokasi yang menjadi sasaran penelitian. Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana penelitian akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Kota Palopo.

2.3 Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dimana anggota sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian (Hardani et al, 2022). Pada teknik *purposive sampling* pertimbangan tertentu dapat dibuat oleh peneliti itu sendiri. Adapun kriteria informan sebagai berikut :

Kriteria Inklusi Informan	Kriteria Eksklusi
1) Bukan individu yang telah dipindahkan dari sektor ke sektor lainnya secara resmi	1) Individu yang telah dipindahkan dari sektor ke sektor lainnya secara resmi
2) Telah bekerja pada sektor tersebut min. 6 bulan	2) Bekerja pada sektor tersebut kurang dari 6 bulan
3) Terlibat dalam program/kegiatan konvergensi lintas sektor penanganan stunting di Kota Palopo	3) Tidak terlibat dalam program/kegiatan konvergensi lintas sektor penanganan stunting di Kota Palopo
4) Memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait konvergensi lintas sektor dalam penanganan stunting di Kota Palopo	4) Tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait konvergensi lintas sektor dalam penanganan stunting di Kota Palopo

2.3.1 Informan Kunci

Informan kunci merupakan informan yang memiliki informasi secara menyeluruh mengenai konvergensi lintas sektor penanganan stunting di Kota Palopo. Pada penelitian ini informan kunci ialah, Sekretariat Tim TPPS Kota Palopo dan Perwakilan OPD-OPD yang ikut serta dalam Tim TPPS Kota Palopo.



Jtama

merupakan informan yang memiliki peran sentral dalam kebijakan penanganan stunting di Kota Palopo. Pada penelitian ini informan pemerintah Kota Palopo (Sekda Kota Palopo)

nyono (2010) terdapat tiga tahapan utama penelitian kualitatif yang nyono, 2010) :

skripsi

Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang peneliti dengar, lihat, dan rasakan berdasarkan pertanyaan yang ditanyakan. Pada tahap ini informasi atau data yang diperoleh cukup banyak dan bervariasi serta belum tersusun dengan jelas.

2.4.2 Tahap Reduksi/Fokus

Pada tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang telah peneliti dapatkan pada tahap pertama untuk terfokus pada masalah tertentu. Pada tahap ini peneliti melakukan penyortiran data dengan mengelompokkan data menjadi berbagai kategori sesuai dengan fokus penelitian.

2.4.3 Tahap Selection

Pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci. Pada tahap ini peneliti akan melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh sehingga, peneliti dapat menemukan tema atau hasil akhir dari penelitian.

2.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang diperlukan dalam mengumpulkan data (Alhamid & Anufia, 2019). Pada penelitian kualitatif peneliti menjadi instrument penelitian sekaligus pengumpul data. Dalam mengumpulkan data penelitian kualitatif alat yang digunakan merupakan, pedoman wawancara, lembar catatan wawancara, perekam suara, pulpen, dan foto.

2.6 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif data yang dikumpulkan didasarkan pada kualitas penelitian sangat bergantung terhadap kualitas dan kelengkapan data yang dihasilkan. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

2.6.1 Wawancara Mendalam

Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara mendalam. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk bertukar informasi. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada informan secara *face to face* terkait pelaksanaan kolaborasi lintas sektor penanganan stunting di Kota Palopo.

2.6.2 Telaah Dokumen

Telaah dokumen merupakan suatu langkah penelitian untuk melakukan penyelidikan, kajian, dan pemeriksaan terkait suatu hal melalui dokumen-dokumen yang mengatur pelaksanaan sebuah kegiatan. Telaah dokumen dilakukan pada dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan aksi kolaborasi lintas sektor penanganan stunting di Kota Palopo seperti, laporan pelaksanaan intervensi spesifik dan intervensi khusus mengenai penanganan stunting di Kota Palopo.

2.7 Sumber Data

Pada penelitian ini data yang dipilih merupakan data yang mengutamakan perspektif emik. Penelitian studi kasus kualitatif merupakan saran utama bagi penelitian emik. Penelitian emik merupakan jenis atau kategori yang didasarkan pada subjek penelitian (Rahardjo, 2017). Pada penelitian ini data dibagi menjadi :

2.7.1 Data Primer

Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam yang informan yang telah dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Proses yang dilakukan merupakan wawancara mendalam *In-depth Interview*.

nder

an ini data sekunder berasal dari telaah dokumen yang berkaitan dengan aksi kolaborasi penanganan stunting yang melibatkan di Kota Palopo.



2.8 Pengolahan Data

Menurut Miles dan Huberman (2014) pengolahan data kualitatif meliputi empat tahap kegiatan yaitu (S. Saleh, 2017) :

2.8.1 Pengumpulan Data

Informasi yang telah didapatkan dari hasil wawancara dan telaah dokumen direkam dalam catatan lapangan yang terbagi menjadi dua bagian yakni deskriptif dan reflektif. Bagian deskriptif berfungsi sebagai catatan langsung mengenai apa yang diamati dan didengar oleh peneliti tanpa adanya penilaian atau hasil interpretasi yang peneliti berikan sedangkan bagian reflektif memuat impresi, komentar, serta interpretasi peneliti terhadap temuan yang ditemui.

2.8.2 Reduksi Data

Setelah pengumpulan data selesai, langkah berikutnya adalah melakukan reduksi data dengan tujuan memilih informasi yang relevan dan signifikan. Fokusnya adalah pada data yang dapat membantu dalam pemecahan masalah, penemuan, atau jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Proses ini melibatkan penyederhanaan serta pengorganisasian sistematis dari temuan yang penting beserta maknanya

2.8.3 Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Pada penelitian ini data disajikan dalam bentuk naratif untuk memudahkan penelitian menguasai informasi atau data penelitian yang didapatkan.

2.8.4 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

2.9 Analisis Data

Pada pelaksanaan analisis data pada penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan hasil penelitiannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan melakukan pengorganisasian data, menjabarkan data-data tersebut ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Abdul, 2020). Analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis *content*.

2.10 Keabsahan Data

Keabsahan data dalam konteks penelitian kualitatif mencakup konsep validitas dan reliabilitas, yang disesuaikan dengan perspektif, kriteria, dan paradigma penelitian yang spesifik. Untuk menilai keabsahan data, diperlukan penggunaan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada sejumlah kriteria yang relevan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi untuk memperoleh keabsahan data. Triangulasi merupakan bentuk kombinasi antara data/informan dengan berbagai metode dalam satu penelitian (N. F. Saleh, 2023). yang digunakan pada penelitian ini yaitu, triangulasi sumber dan



Triangulasi Sumber

Sumber dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui berbeda-beda. Sumber-sumber yang dimaksud merupakan pihak-pihak yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada beberapa informan yang berbeda-beda.

2.10.2 Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan menanyakan hal yang sama kepada informan melalui teknik yang berbeda. Pada penelitian ini triangulasi teknik dilakukan dengan melakukan wawancara dan telaah dokumen.

2.11 Penyajian Data

Pada penelitian ini data disajikan melalui teks naratif, yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara detail hasil dari wawancara mendalam dengan informan yang telah dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Pada penelitian ini penyajian data tidak hanya digambarkan sebagai sekedar rangkaian informasi, namun juga menciptakan narasi yang berisi pengalaman dan pandangan dari informan penelitian.

2.12 Etika Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, untuk meminimalisir kemungkinan risiko-risiko yang dapat merugikan informan, sehingga informan tidak menolak dan mau berpartisipasi. Proposal penelitian ini telah diajukan kepada Komisi Etik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin dan telah mendapatkan rekomendasi persetujuan etik Nomor: **976/UN4.14.1/TP.01.02/2024.**

